KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : DPR: Energi Terbarukan Perlu Jadi Agenda Prioritas
Tanggal : Sabtu, 10 September 2016
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 4

DPR: Energi Terbarukan Perlu Jadi Agenda Prioritas

KUHARI/SINDO/KSN/KURNIA/PRI

Ketua BKSAP DPR Nurhayati Ali Assegaf bertemu dengan Direktur OECD Christian Kastrop, Simon Upton, dan Michiko Ukumura.

Laporan Wartawan KORAN SINDO

KISWONDARI

JEJU, KOREA SELATAN

Forum *Global Green Growth Week 2016* di Jeju, Korea Selatan, mendapatkan perhatian dari perwakilan DPR RI. Para wakil rakyat mendorong agar persoalan energi terbarukan dan dampak perubahan iklim yang menjadi tema utama forum internasional ini mendapat perhatian dan tindak lanjut dari pemerintahan RI.

"Berbicara *green economy* dan *renewable energy* , tentunya membutuhkan komitmen Pemerintah Indonesia untuk berperan serta dalam mewujudkannya. Kami telah melihat komitmen dari banyak negara akan isu energi terbarukan dan pembangunan berkelanjutan. Tentunya Indonesia mempunyai kesempatan yang sama," kata Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR Nurhayati Ali Assegaf di sela-sela forum *GGG Week 2016* di International Convention Center (ICC) Jeju, Korea Selatan.

Untuk itu, lanjut Nurhayati, DPR akan mengawasi keseriusan pemerintah dalam merealisasi pembaruan energi melalui para anggota BKSAP yang tersebar di berbagai komisi. Utamanya komisi energi, lingkungan, dan keuangan. Menurut politikus Partai Demokrat ini, keberhasilan program energi terbarukan tergantung pada *political will* , ketersediaan sumber daya alam, dan dukungan dana.

Jika melihat potensi Indonesia, ketiga hal tersebut bukanlah masalah besar. Mengenai *political will*, Nurhayati percaya bahwa Pemerintah Indonesia mempunyai komitmen besar dalam melakukan pembaruan energi. Untuk ketersediaan SDA, Indonesia sangat kaya dengan air, matahari, dan angin sebagai sumber-sumber energi terbarukan, sedangkan untuk dukungan keuangan pemerintah harus membuka peluang kepada investor atau orang-orang yang ingin melakukan usaha, khususnya di bidang *renewable energy*."Dalam forum ini kami juga melihat ada upaya melibatkan lembaga keuangan internasional di mana ada perwakilan World Bank, ada Asian Development Bank (ADB), ada juga Organization for Economic Cooperation Development (OECD), nah ini yang harus dilakukan," tegasnya.

Hanya saja, lanjut Nurhayati, berdasarkan penilaian Panitia Kerja (Panja) Sustainable Development Goals (SDGs) BKSAP DPR atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, langkah-langkah Pemerintah Indonesia masih sangat kurang. Karena itu, menurut dia, DPR akan mendukung pemerintah atau memberikan rekomendasi lewat Panja SDGs BKSAP, yakni agar pemerintah memprioritaskan pembaruan energi yang juga bagian dari pembangunan infrastruktur yang menjadi domain pemerintah.

"Pak SBY mengatakan bahwa ada *job opportunity* di *renewable energy*, *green economy*, kemudian ada kesempatan pada peluang baru bagi investor. Juga bagi pemerintah mungkin meringankan karena kita tidak bergantung pada minyak bumi, tapi juga bisa dari *solar heat;* tidak bergantung pada batu bara, tapi juga dari air. Matahari itu bisa dijadikan sumber penerangan atau listrik yang kita masih sangat butuhkan, jadi itu yang luar biasa," bebernya.